

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Permasalahan tentang wilayah Niger Gesong merupakan masalah tentang tindakan Malaysia membangun menara Suar serta memasukkan Niger Gesong ke dalam Peta Baru 1979 yang mengklaim secara Sepihak serta mempromosikan daerah tersebut sebagai wisata bahari Malaysia dan pengusiran secara sepihak nelayan Indonesia yang mencari Ikan di Karang Niger gesong oleh Tentara Malaysia.

Inti permasalahan mengenai staus Hukum dan siapa Negara yang mempunya kedaulatan di Niger Gesong, sebelum masalah ini muncul Indonesia dan Malaysia telah duduk bersama dalam perjanjian Bilateral tentang landas kontinen antara Indonesia dengan Malaysia tahun 1969, dimana dalam perjanjian yang sudah disahkan ini Indonesia melalui plotting pada Peta medapatkan 2/3 wilayah Niger gesong, akan tetapi seiring jalan waktu Malaysia menerbitkan Peta Baru (1979) di mana Tanjung datuk serta wilayah Niger Gesong di klaim secara sepihak.

Sebagai Negara Kepulauan sesuai yang di perjuangkan Indonesia dan di tuangkan dalam UNCLOS 1982 Indonesia di akui sebagai Negara Kepulauan, yang dalam hal ini sesuai berdasarkan Pasal 47 UNCLOS 1982, sehinga jika acuan Negara Kepulauan ini dibawa dalam Proses Negosiasi dengan Malaysia akan memberikan tawar menawar yang kuat dalam perundingan, karena dalam hal ini juga posisi Malaysia di pandang sebagai negara Continental / Daratan bukan sebagai negara Kepulauan. Walaupun Niger Gesong dalam konsepnya bukan Pulau tetapi paradigma pembangunan sekarang mengarah dari wilayah pesisir dan Laut

makan bisa dikatakan dapat menjadi kajian yang sama seperti Tanjung Datuk, tentunya harus ada aturannya yang mengatur hak tersebut.

## **B. SARAN**

Dalam penulisan ini, penulis memberikan beberapa saran yaitu:

- 1.** Indonesia dan Malaysia harus lebih aktif dalam bernegosiasi untuk menegaskan posisi masing masing mereka, Indonesia yang mempunyai posisi yang kuat dalam Negosiasi ini harus segera merampingkannegosiasinya agar nelayan Indonesia yang ingin melaut dan mencari Ikan di perairan sekitar Niger Gesong tidak resah lagi akan di usir dari wilayahnya sendiri.
- 2.** Kedua negara seharusnya mengerti sekali, bahwa menunda negosiasi akan menghabiskan banyak waktu yang dimana ditakutkan belum selesainya negosiasi sudah lebih dulu ada masalah besar yang terjadi dan saling tumpang tindah penguasaan di perairan Niger Gesong.
- 3.** Jika kedua Negara tidak menemui kata sepakat ataupun Penyelesaiannya maka tidak ada salahnya di bawa ke Pengadilan Arbitrase atau Mahkamah Hukum Laut Internasional agar masalah bisa cepat terselesaikan dan memberikan kepastian atas Wilayah Perairan Niger Gesong.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Burke, W. T., 1977. Who Goes Where, When and How: International Law of the Sea for Transportation. International Organization.

Dahuri, R.,J. Rais, S.P. Ginting dan M.J. Sitepu, 1996, Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, Jakarta, Pradnya Paramita

Kusumo w s. 2009; Indonesia Negara Maritim. Cetakan II. Teraju. Jakarta

Mochtar Kusumaatmadja, 1978. Bunga Rampai Hukum Laut, Binacipta, Bandung

Ogiso, M., 1987. Japan and the UN Convention on the Law of the Sea. Japan and International Law, 25(1),

Starke .J.G,2014,Pengantar hukum internasional(terj. Bambang Iriana Djajaatmadja, Introduction to International Law), edisi kesepuluh, sinar grafika. Jakarta

Suwoto, 2012; Negara Kesatuan Republik Indonesia; cetakan pertama. Balai Pustaka. Jakarta

### **Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UUD 1945; BAB IXA Amandemen ke 2; pasal 25E

United Nation Conferention on The Law of The Sea (Unclos) III tahun 1982.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

PP No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penetapan garis landas Kontinen antara kedua Negara.

**Skripsi :**

Jayanti.D.Y,2013” Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia”, Malang, Universitas Brawijaya

**Jurnal :**

Agoes.E.R,2004,”Praktik Negara-Negara atas konsepsi negara kepulauan, Indonesian Journal of International, Vol 1, hal 445

Jayanto.D.S,2004,”Upaya Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik Gosong Niger”, Hal 625 – 640

**Internet:**

arsana, 6 Maret 2006; Gosong Niger: Samakah dengan Ambalat?,

<http://catatanagam.blogspot.co.id/2008/05/gosong-niger-samakah-dengan-ambalat.html>.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi\\_Djuanda](https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Djuanda)

<http://ksp.go.id/deklarasi-djuanda-dan-hari-nusantara/>.

<http://lembar200.blogspot.co.id/2015/08/penjelasan-isi-deklarasi-djuanda.html>

<https://nasional.sindonews.com/read/865962/14/malaysia-bangun-mercusuar-di-wilayah-sengketa-tni-kirim-kapal-perang-1400680494>.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Negara\\_kepulauan](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_kepulauan).

[https://en.wikipedia.org/wiki/United\\_Nations\\_Convention\\_on\\_the\\_Law\\_of\\_the\\_Sea](https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_on_the_Law_of_the_Sea).

maskun.S.H.L.L.M, 9 Desember 2011,”Konsepsi Negara Kepulauan”, negara hukum,

<http://www.negarahukum.com/hukum/konsepsi-negara-kepulauan-Indonesia.html>.

[ejournal.hi.fisip.unmul](http://www.ejournal.hi.fisip.unmul.org), <http://www.ejournal.hi.fisip.unmul.org>.

[www.geografiana.com](http://www.geografiana.com).

yuliawan.W. 2 Juni 2014, “Analisis Sengketa Perbatasan Indonesia”. Widhiblog,

[widhiyuliawan.blogspot.co.id/2014/06analisis-sengketa-perbatasan-Indonesia.html](http://widhiyuliawan.blogspot.co.id/2014/06analisis-sengketa-perbatasan-Indonesia.html).





PERSETUDJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA TENTANG  
PENETAPAN GARIS BATAS LANDAS KONTINEN  
ANTARA KEDUA NEGARA.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH  
MALAYSIA,

BERHASRAT untuk memperkuat ikatan persahabatan jang  
telah terdjalin lama antara kedua Negara, dan

BERHASRAT untuk menetapkan garis-garis batas landas  
kontinen antara kedua Negara,

TELAH MENJETUDJUI SEBAGAI BERIKUT:

Pasal I

(1) Batas-batas landas kontinen Indonesia dan Malaysia  
di Selat Malaka dan Laut Tjina Selatan adalah garis-garis  
lurus jang menghubungkan titik-titik jang ditentukan dalam  
kolom 1 dibawah jang koordinat-koordinatnja ditetapkan dalam  
kolom 2 dan 3 jang segaris dengan titik-titik tersebut.

A. Di Selat Malaka:

(1) Nomor Titik	(2) Garis Budjur Timur	(3) Garis Lintang Utara
1.	98° 17'.5	05° 27'.0
2.	98° 41'.5	04° 55'.7
3.	99° 43'.6	03° 59'.6
4.	99° 55'.0	03° 47'.4
5.	101° 12'.1	02° 41'.5
6.	101° 46'.5	02° 15'.4
7.	102° 13'.4	01° 55'.2
8.	102° 35'.0	01° 41'.2
9.	103° 03'.9	01° 19'.5
10.	103° 22'.8	01° 15'.0

*[Handwritten signatures and initials]*



(2)

B. Di Laut Tjina Selatan (Bagian Barat - Lepas Pantai Timur Malaysia Barat):

(1) <u>Nomor Titik</u>	(2) <u>Garis Budjur Timur</u>	(3) <u>Garis Lintang Utara</u>
11.	104° 29'.5	01° 23'.9
12.	104° 53'.0	01° 38'.0
13.	105° 05'.2	01° 54'.4
14.	105° 01'.2	02° 22'.5
15.	104° 51'.5	02° 55'.2
16.	104° 46'.5	03° 50'.1
17.	104° 51'.9	04° 03'.0
18.	105° 28'.8	05° 04'.7
19.	105° 47'.1	05° 40'.6
20.	105° 49'.2	06° 05'.8

C. Di Laut Tjina Selatan (Bagian Timur - Lepas Pantai Serawak):

(1) <u>Nomor Titik</u>	(2) <u>Garis Budjur Timur</u>	(3) <u>Garis Lintang Utara</u>
21.	109° 38'.8	02° 05'.0
22.	109° 54'.5	03° 00'.0
23.	110° 02'.0	04° 40'.0
24.	109° 59'.0	05° 31'.2
25.	109° 38'.6	06° 18'.2

(2) Koordinat-koordinat dari titik-titik yang ditetapkan dalam ayat 1 adalah koordinat-koordinat geografi dan garis-garis yang menghubungkannya diperlihatkan diatas peta yang dilampirkan kepada Persetujuan ini sebagai Lampiran "A".

(3) Letak yang sebenarnya dari titik-titik tersebut dilaut akan ditentukan dengan suatu tjara yang disetujui bersama oleh pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Pemerintah.

*h* *M.S.*



(3)

(4) Jang dimaksud dengan "pedjabat-pedjabat jang berwenang" tersebut ajat 3 adalah, untuk Indonesia, Direktur Direktorat Hidrografi Angkatan Laut Republik Indonesia, termasuk setiap orang jang dikuasakannja, dan untuk Malaysia, Pengarah Pemetaan Negara, Malaysia, termasuk setiap orang jang dikuasakannja.

#### Pasal II

Masing-masing Pemerintah dengan ini berdjandji akan mendjamin bahwa segala langkah jang perlu akan diambil didalam negeri untuk memenuhi ketentuan-ketentuan jang tertjantum dalam Persetujuan ini.

#### Pasal III

Persetudjuan ini sama sekali tidak akan mempengaruhi persetudjuan jang mungkin diadakan dimasa depan antara kedua Pemerintah berkenaan dengan penetapan garis-garis batas laut wilayah antara kedua Negara.

#### Pasal IV

Apabila suatu struktur tunggal minyak dan gas bumi melintasi garis-garis lurus jang disebut dalam pasal I, dan bagian dari struktur tersebut jang terletak di salah satu sisi dari garis-garis tersebut sebahagian atau seluruhnja dapat diusahakan eksploitasinja dari sisi lain dari garis-garis tersebut, maka kedua Pemerintah akan berusaha untuk mentjapai persetudjuan tentang tjara-tjara jang paling efektif dalam mengusahakan eksploitasi struktur tersebut.

u





(4)

Pasal V

Setiap perselisihan antara kedua Pemerintah jang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Persetudjuan ini akan diselesaikan setjara damai melalui musjawarah atau perundingan.

Pasal VI

Persetudjuan ini akan disahkan menurut prosedur konstitusionil masing-masing Negara.

Pasal VII

Persetudjuan ini akan mulai berlaku pada tanggal penukaran Piagam Pengesahannja.

Untuk menjaksikannja, kedua Pemerintah jang bertindak melalui wakil-wakil mereka jang telah dikuasakan untuk maksud ini, telah menanda-tangani Persetudjuan ini.

*H. M.* DIBUAT DALAM RANGKAP DUA di *Kuala Lumpur*..... pada tanggal *27 Oktober, 1969*..... dalam Bahasa Indonesia, Malaysia dan Inggeris. Dalam hal terdapat ketidak-sesuaian pengertian antara naskah-naskah, maka naskah Inggeris jang menentukan.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK  
*H. M.* INDONESIA,

UNTUK PEMERINTAH MALAYSIA,

**Signed**

**Signed**

*Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro,*  
*Menteri Pertambangan,*  
*Republik Indonesia.*

*Tan Sri Abdul Kadir bin Yusof,*  
*Sequam Negara,*  
*Malaysia.*



PERJANJIAN ANTARA KERAJAAN REPUBLIK  
INDONESIA DAN KERAJAAN MALAYSIA BER-  
KENAAN DENGAN PERSEMPADANAN PELANTAR  
BENUA DI-ANTARA KEDUA NEGERI

---

KERAJAAN REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN MALAYSIA,

DENGAN TUJUAN hendak mempereratkan tali persahabatan  
sejarah antara kedua Negeri itu,

DAN DENGAN TUJUAN hendak menetapkan sempadan pelantar  
benua antara kedua Negeri itu,

TELAH BERSETUJU SAPERTI BERIKUT:

Perkara I

(1) Sempadan pelantar benua bagi Indonesia dan Malaysia  
di-Selat Melaka dan Laut China Selatan ia-lah garisan2 lurus yang  
menghubongi tempat2 yang di-nyatakan dalam ruang 1 di-bawah ini  
dan kodinet bagi tempat2 itu ada-lah di-nyatakan bertentang  
dengan-nya dalam ruang 2 dan 3 di-bawah ini -

A. Di-Selat Melaka:

(1) <u>Tempat</u>	(2) <u>Garisan Bujur T</u>	(3) <u>Garisan Lintang U</u>
1.	98° 17'.5	05° 27'.0
2.	98° 41'.5	04° 55'.7
3.	99° 43'.6	03° 59'.6
4.	99° 55'.0	03° 47'.4
5.	101° 12'.1	02° 41'.5
6.	101° 46'.5	02° 15'.4
7.	102° 13'.4	01° 55'.2
8.	102° 35'.0	01° 41'.2
9.	103° 03'.9	01° 19'.5
10.	103° 22'.8	01° 15'.0

h



- 2 -

B. Di-Laut China Selatan (Sa-belah Barat - Luar-pantai Pantai Timor Malaysia Barat):

(1) <u>Tempat</u>	(2) <u>Garisan Bujur T</u>	(3) <u>Garisan Lintang U</u>
11.	104° 29'.5	01° 23'.9
12.	104° 53'.0	01° 38'.0
13.	105° 05'.2	01° 54'.4
14.	105° 01'.2	02° 22'.5
15.	104° 51'.5	02° 55'.2
16.	104° 46'.5	03° 50'.1
17.	104° 51'.9	04° 03'.0
18.	105° 28'.8	05° 04'.7
19.	105° 47'.1	05° 40'.6
20.	105° 49'.2	06° 05'.8

C. Di-Laut China Selatan (Sa-belah Timor - Luar-pantai Pantai Sarawak):

(1) <u>Tempat</u>	(2) <u>Garisan Bujur T</u>	(3) <u>Garisan Lintang U</u>
21.	109° 38'.8	02° 05'.0
22.	109° 54'.5	03° 00'.0
23.	110° 02'.0	04° 40'.0
24.	109° 59'.0	05° 31'.2
25.	109° 38'.6	06° 18'.2

(2) Kodinet bagi tempat2 yang di-nyatakan dalam perenggan 1 ada-lah kodinet2 dari segi ilmu alam dan garisan2 lurus yang menghubungkan tempat2 itu ada-lah di-tunjokkan dalam charta yang di-lampirkan sa-bagai Lampiran 'A' kepada Perjanjian ini.

(3) Kedudukan yang sa-benar bagi tempat2 yang tersebut di-atas di-laut hendak-lah di-tentukan dengan suatu chara yang di-persetujui antara pehak-berkuasa yang layak bagi kedua2 Kerajaan.

h



- 3 -

(4) Bagi maksud perenggan (3) "pehak-berkuasa yang layak" berkenaan dengan Republik Indonesia erti-nya Direktur, Direktorat Hidrografi Angkatan Laut Republik Indonesia dan termasuk-lah mana2 orang yang di-berikuasa oleh-nya dan berkenaan dengan Malaysia erti-nya Pengarah Pemetaan Negara, Malaysia dan termasuk-lah mana2 orang yang di-berikuasa oleh-nya.

#### Perkara II

Tiap2 satu Kerajaan ada-lah dengan ini mengaku akan memastikan supaya segala langkah yang perlu di-ambil dalam-negeri bagi mematuhi syarat2 Perjanjian ini.

#### Perkara III

Perjanjian ini tidak akan menyentoh dengan apa chara apa2 perjanjian yang mungkin di-buat di-antara kedua2 Kerajaan mengenai persempadanan wilayah2 laut antara dua buah Negeri itu.

#### Perkara IV

Jika mana2 satu bentok muka bumi petroliam atau gas asli menjulor keluar garisan2 lurus yang tersebut dalam Perkara di-atas dan bahagian bentok muka bumi pada sa-belah garisan2 lurus itu boleh di-hasilusaha dari sa-belah yang satu lagi itu, maka kedua2 Kerajaan hendak-lah berusaha menchapai persetujuan tentang chara bagaimana bentok muka bumi itu boleh di-hasilusaha dengan sa-habis2 baik-nya.

#### Perkara V

Apa2 pertikaian di-antara kedua2 Kerajaan yang timbul daripada pentafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini hendak-lah di-selesaikan sa-chara damai dengan berunding.

#### Perkara VI

Perjanjian ini hendak-lah di-sahkan mengikut kehendak2 perlembagaan kedua2 buah Negeri.

h

4/-



- 4 -

Perkara VII

Perjanjian ini hendak-lah mula berkuatkuasa pada tarikh pertukaran Suratchara2 Pengesahan.

PADA MENYAKSIKAN PERKARA2 DI-ATAS maka yang bertandatangan di-bawah ini, sa-bagai di-berikuasa dengan sempurna-nya bagi maksud itu oleh Kerajaan mereka masing2, telah menandatangani Perjanjian ini.

*27*  
*Oktober* DI-PERBUAT di-*Kuala Lumpur*, pada *27* haribulan, 1969, dalam dua salinan dalam bahasa Indonesia, bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Jika sa-kira-nya ada apa2 pertelingkahan di-antara naskah2 itu, maka naskah Inggeris hendak-lah di-pakai.

BAGI PEHAK KERAJAAN  
REPUBLIK INDONESIA:

BAGI PEHAK KERAJAAN MALAYSIA:

Signed

Signed

.....  
*Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro,*  
*Menteri Pertambangan,*  
*Republik Indonesia.*

.....  
*Pan Sri Abdul Kadir bin Yusof,*  
*Peguan Negara,*  
*Malaysia.*



AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT  
OF MALAYSIA RELATING TO THE DELIMITATION  
OF THE CONTINENTAL SHELVES BETWEEN  
THE TWO COUNTRIES

-----

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA,

DESIRING to strengthen the existing historical bonds of  
friendship between the two Countries,

AND DESIRING to establish the boundaries of the continental  
shelves between the two Countries,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE I

(1) The boundaries of the Indonesian and the Malaysian  
continental shelves in the Straits of Malacca and the South China Sea  
are the straight lines connecting the points specified in column 1  
below whose co-ordinates are specified opposite those points in  
columns 2 and 3 below:-

A. In the Straits of Malacca:

<u>(1)</u> <u>Point</u>	<u>(2)</u> <u>Longitude E</u>	<u>(3)</u> <u>Latitude N</u>
1.	98° 17'.5	05° 27'.0
2.	98° 41'.5	04° 55'.7
3.	99° 43'.6	03° 59'.6
4.	99° 55'.0	03° 47'.4
5.	101° 12'.1	02° 41'.5
6.	101° 46'.5	02° 15'.4
7.	102° 13'.4	01° 55'.2
8.	102° 35'.0	01° 41'.2
9.	103° 03'.9	01° 19'.5
10.	103° 22'.8	01° 15'.0

B. In the South China Sea (Western Side - Off the East  
Coast of West Malaysia):

<u>(1)</u> <u>Point</u>	<u>(2)</u> <u>Longitude E</u>	<u>(3)</u> <u>Latitude N</u>
11.	104° 29'.5	01° 23'.9
12.	104° 53'.0	01° 38'.0
13.	105° 05'.2	01° 54'.4

h  
1987





2.

14.	105° 01'.2	02° 22'.5
15.	104° 51'.5	02° 55'.2
16.	104° 46'.5	03° 50'.1
17.	104° 51'.9	04° 03'.0
18.	105° 28'.8	05° 04'.7
19.	105° 47'.1	05° 40'.6
20.	105° 49'.2	06° 05'.8

C. In the South China Sea (Eastern Side - Off the Coast of Sarawak):

<u>(1)</u> <u>Point</u>	<u>(2)</u> <u>Longitude E</u>	<u>(3)</u> <u>Latitude N</u>
21.	109° 38'.8	02° 05'.0
22.	109° 54'.5	03° 00'.0
23.	110° 02'.0	04° 40'.0
24.	109° 59'.0	05° 31'.2
25.	109° 38'.6	06° 18'.2

(2) The co-ordinates of the points specified in paragraph (1) are geographical co-ordinates and the straight lines connecting them are indicated on the chart attached as Annexure 'A' to this Agreement.

(3) The actual location of the abovementioned points at sea shall be determined by a method to be mutually agreed upon by the competent authorities of the two Governments.

(4) For the purposes of paragraph (3) "competent authorities" in relation to the Republic of Indonesia means the Direktorat, Direktorat Hidrografi Angkatan Laut, Republik Indonesia and includes any person authorised by him, and in relation to Malaysia the Pengarah, Pemetaan Negara, Malaysia and includes any person authorised by him.

ARTICLE II

Each Government hereby undertakes to ensure that all the necessary steps shall be taken at the domestic level to comply with the terms of this Agreement.

ARTICLE III

This Agreement shall not in any way affect any future agreement which may be entered into between the two Governments

h



3.

relating to the delimitation of the territorial sea boundaries between the two Countries.

#### ARTICLE IV

If any single geological petroleum or natural gas structure extends across the straight lines referred to in Article I and the part of such structure which is situated on one side of the said lines is exploitable, wholly or in part, from the other side of the said lines, the two Governments will seek to reach agreement as to the manner in which the structure shall be most effectively exploited.

#### ARTICLE V

Any dispute between the two Governments arising out of the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled peacefully by consultation or negotiation.

#### ARTICLE VI

This Agreement shall be ratified in accordance with the constitutional requirements of the two Countries.

#### ARTICLE VII

This Agreement shall enter into force on the date of the exchange of the Instruments of Ratification.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

k.





4.

*h.*  
*h.* DONE IN DUPLICATE at *Kuala Lumpur* the  
*27th* day of *October*, 1969, in the Indonesian, Malaysian  
and English languages. In the event of any conflict between the  
texts, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA:

*h.*

Signed

.....  
*Prof. Dr. Ir. Soemantjo Brodjonegoro,*  
*Menteri Pertambangan,*  
*Republik Indonesia*

FOR THE GOVERNMENT  
OF MALAYSIA:

*h.*

Signed

.....  
*Tan Sri Abdul Kadir bin Jusof,*  
*Peguam Negara,*  
*Malaysia.*



Kuala Lumpur.

22nd September, 1969.

Professor Dr. Mochtar Kusumaatmadja,  
Leader of the Indonesian Delegation to the  
Malaysian/Indonesian Negotiation on the  
Continental Shelf Boundaries.

Dear Professor,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 22nd September, 1969 which reads as follows:-

“

Kuala Lumpur.  
22nd September, 1969.

Enche Mahyuddin bin Haji Mohd. Zain, J. S. M. ,  
Secretary, Ministry of Lands and Mines,  
Malaysia.

Dear Enche Mahyuddin,

With reference to our negotiation and the Agreement concerning the delimitation of the continental shelf boundaries between our two countries, initialled today by us on behalf of our respective Governments, I have the honour to state our understanding that both the negotiation and the Agreement are purely and wholly of a technical nature.

With my renewed assurances of the highest consideration,

Yours sincerely,

(Professor Dr. Mochtar Kusumaatmadja)  
Leader of the Indonesian Delegation. ”

I confirm that your letter and this reply constitute an understanding between us that the negotiation and the Agreement are purely and wholly of a technical nature.

With renewed assurances of my highest consideration,

Yours sincerely,

**Signed**

(Mahyuddin bin Haji Mohd. Zain)  
Secretary, Ministry of Lands and Mines,  
Malaysia.

Kuala Lumpur.

22nd September, 1969.

Enche Mahyuddin bin Haji Mohd. Zain, J. S. M.,  
Secretary, Ministry of Lands and Mines,  
Malaysia.

Dear Enche Mahyuddin,

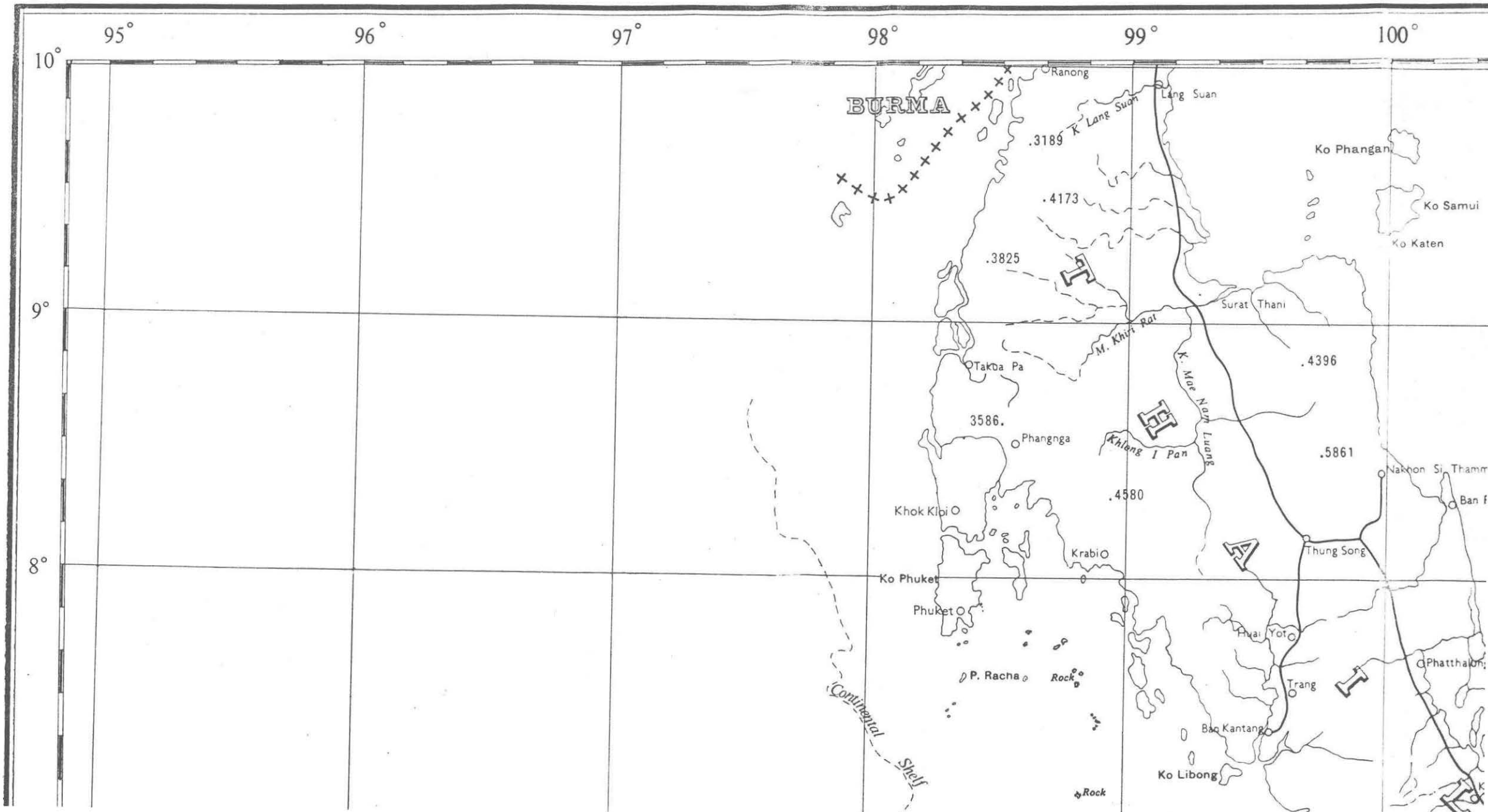
With reference to our negotiation and the Agreement concerning the delimitation of the continental shelf boundaries between our two countries, initialled today by us on behalf of our respective Governments, I have the honour to state our understanding that both the negotiation and the Agreement are purely and wholly of a technical nature.

With my renewed assurances of the highest consideration,

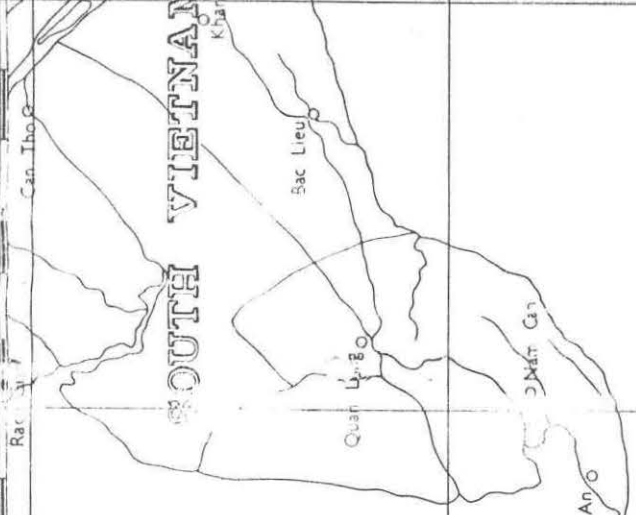
Yours sincerely,

**Signed**

(Professor Dr. Mochtar Kusumaatmadja)  
Leader of the Indonesian  
Delegation.



101° 102° 103° 104° 105° 106°



P. Tamassou  
Poulo Dama

P. Panjang

Vien An  
Poulo Obi

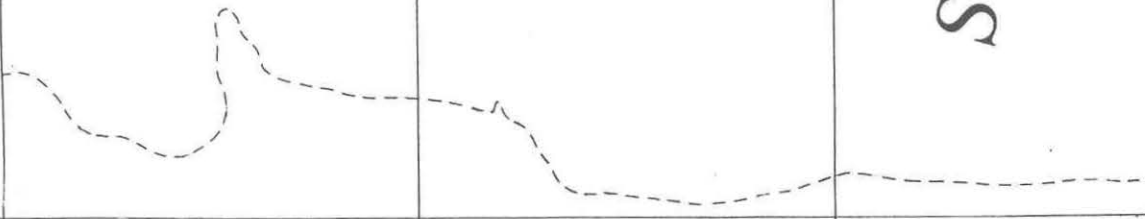
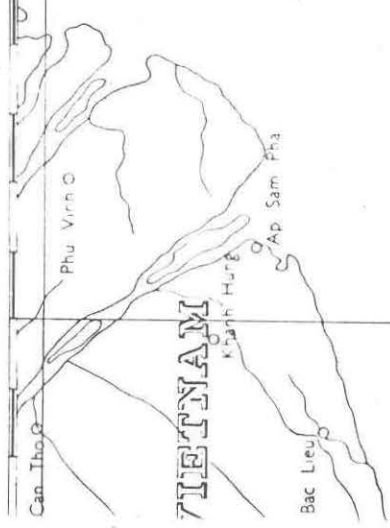
# GULF OF THAILAND

Ko Samui  
Katen

Ban Pak Phanang

Phatthabong  
Khan

106° 107° 108° 109° 110° 111°



S O U T H

111°

112°

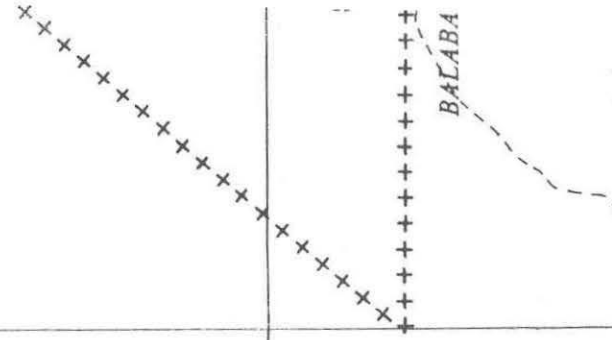
113°

114°

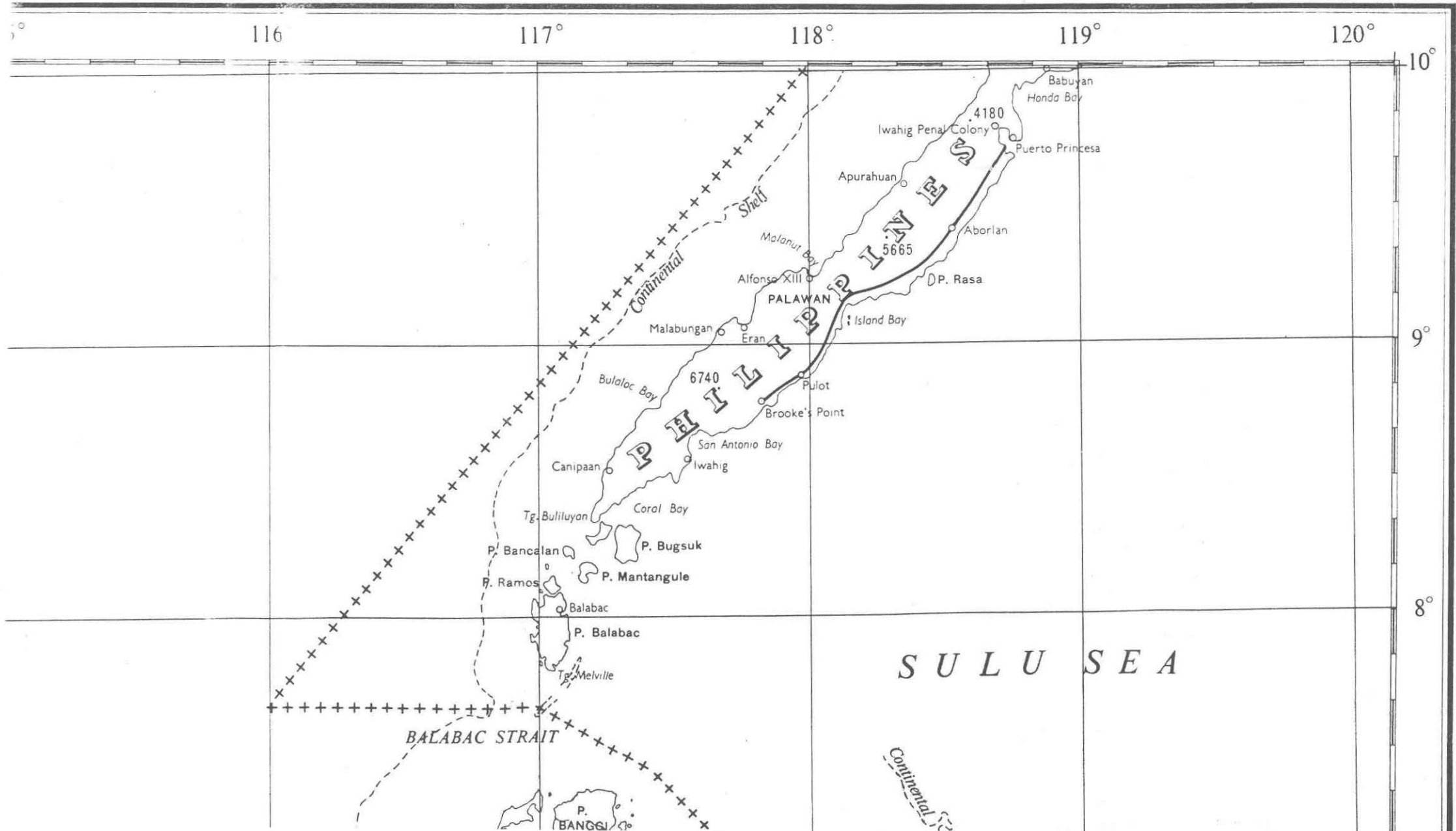
115°

116°

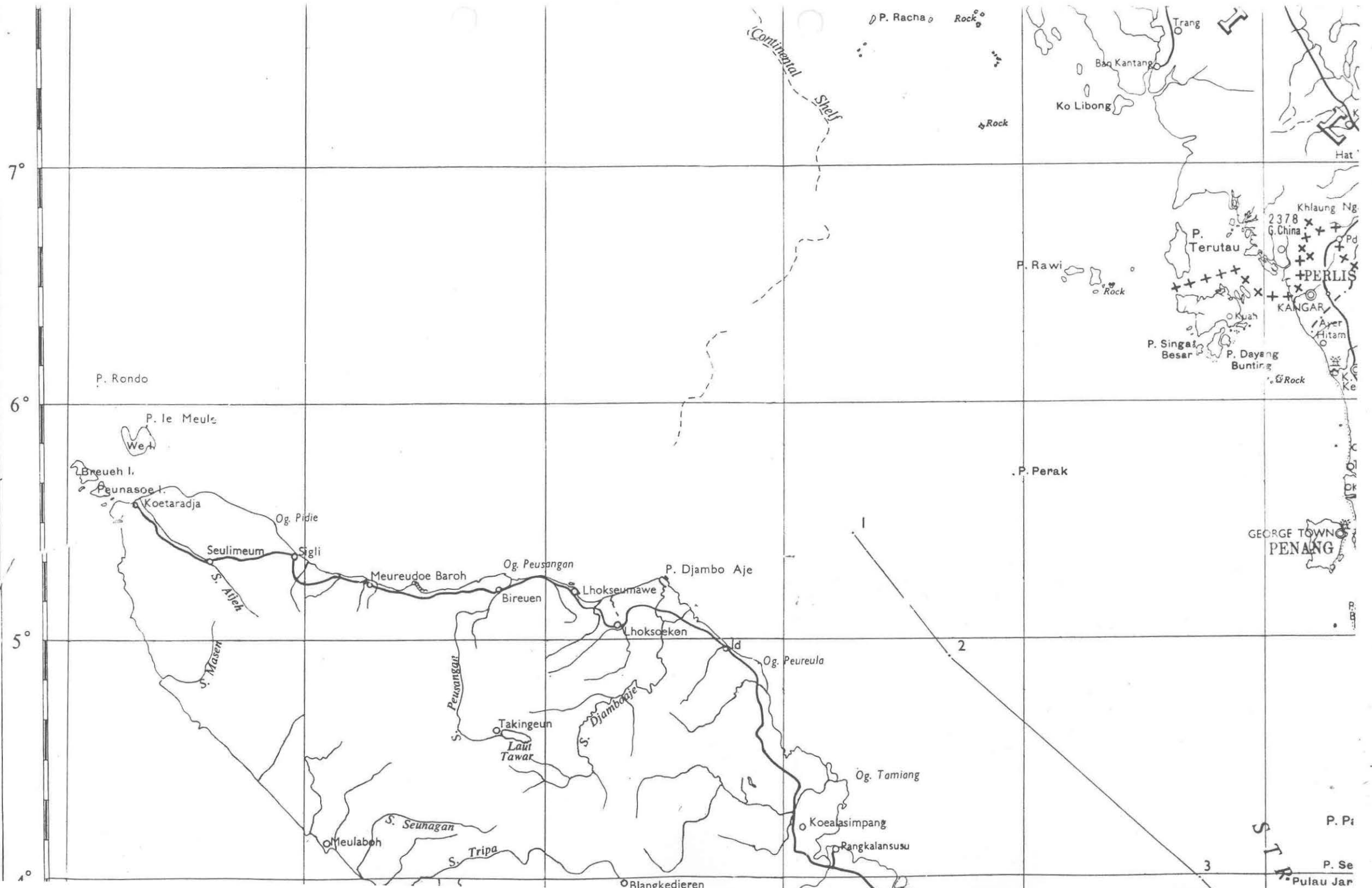
H



# ANNEXURE 'A' to Agreement







7°

6°

5°

4°

P. Rondo

P. le Meule

Bneuh I.

Peunasoe I.

Koetaradja

Og. Pidie

Seulimeum

S. Aljah

S. Masen

Meureudoe Baroh

Og. Peusangan

Bireuen

Lhokseumawe

P. Djambo Aje

Lhoksoeken

Id

Og. Peureula

Takingeun

Lait Tawar

S. Djambonje

Og. Tamiang

Koealasimpang

Rangkalansusu

Meulaboh

S. Seunagan

S. Tripa

Blankedieren

Continental Shelf

P. Racha

Rock

Rock

Bq Kantang

Ko Libong

Hat

P. Rawi

Rock

P. Terutau

P. Singat Besar

P. Dayang Bunting

Khlaung Ng

G. China

2378

Pd

PERLIS

KANGAR

Ayer Hitam

Ke

P. Perak

GEORGE TOWN

PENANG

2

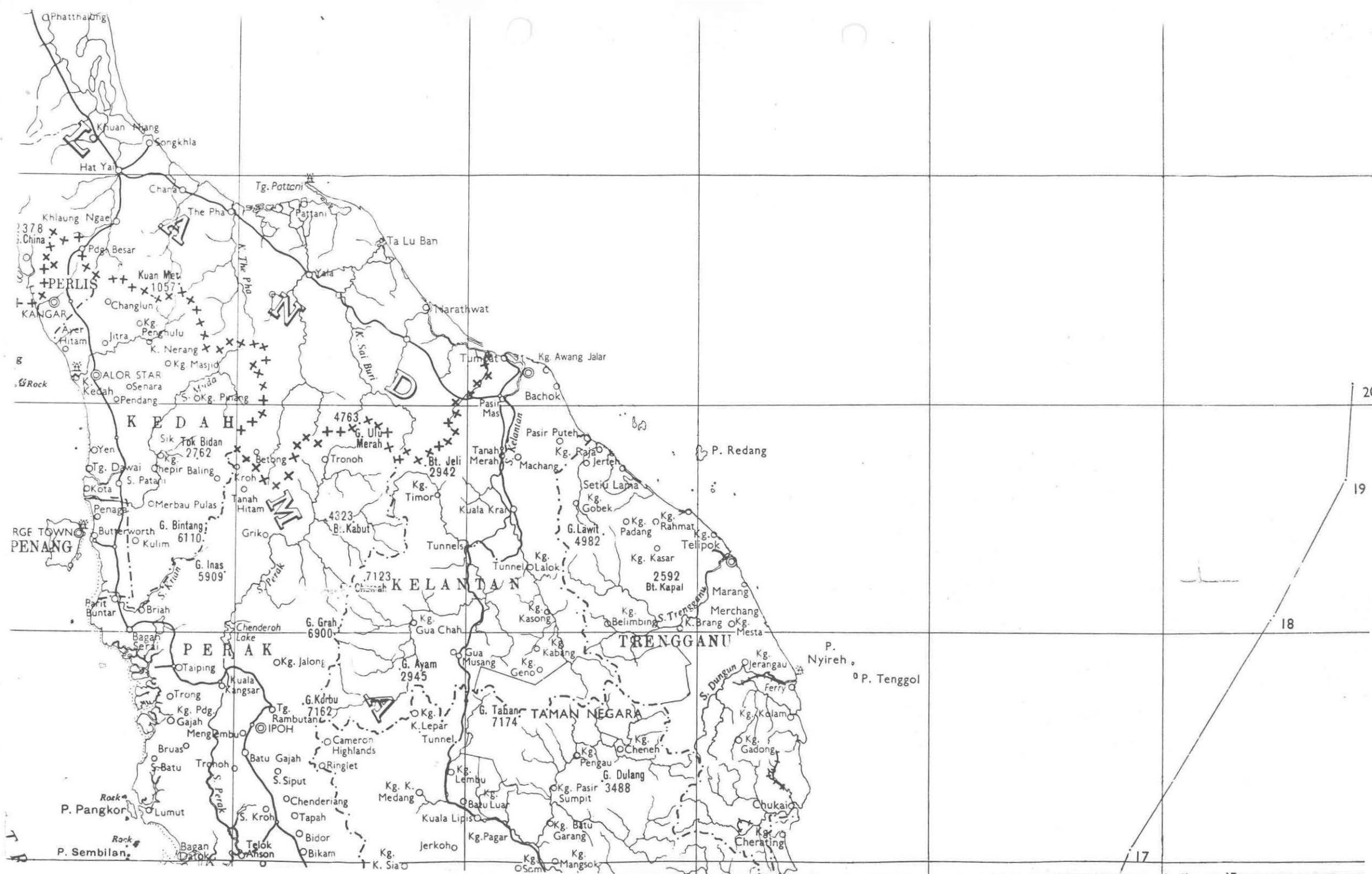
3

S I R

P. Pi

P. Se

Pulau Jar



Phatthaling

Khuan Nang  
Songkhla  
Hat Yai

378  
China  
PERLIS  
KANGAR  
Ayer Hitam

ALOR STAR  
Kedah  
Senara  
Pendang

RGE TOWN  
PENANG

Parit Buntar

PERAK  
Taiping

Trong  
Kg. Pdg.  
Gajah

Bruas  
S. Batu  
Trohoh

P. Pangkor  
Lumut

P. Sembilan  
Batu Anson  
Telok Anson

Tg. Pattani

Chara  
The Pha  
Pattani

Khlaung Ngae  
Kuan Met  
1057  
Changlun

K. Nerang  
Kg. Masjid  
Kg. Pirang

KEDAH  
Sik Tok Bidan  
2762  
Kg. Chepir Baling

G. Bintang  
6110  
Kulim

G. Inas  
5909

PERAK  
Chenderoh Lake  
Kg. Jalong

G. Korbu  
7162  
Kg. Rambutan

Cameron Highlands  
Kg. Ringlet  
Kg. Siput

Ta Lu Ban

Narathwat

4763  
G. Ulu Merah

4323  
B. Kabut

7123  
Chimah

KELANTAN  
Kg. Gua Chah

G. Ayam  
2945

G. Korbu  
7162  
Kg. Rambutan

Cameron Highlands  
Kg. Ringlet  
Kg. Siput

Chenderiang  
Kg. Tapah  
Kg. Bidor

Tumpat

Kg. Awang Jalar

2942  
Bt. Jeli

4982  
G. Lawit

7174  
G. Taban

TRENGGANU  
Kg. Kasong

G. Ayam  
2945

G. Korbu  
7162  
Kg. Rambutan

Cameron Highlands  
Kg. Ringlet  
Kg. Siput

Chenderiang  
Kg. Tapah  
Kg. Bidor

Bachok

Pasir Putih  
Kg. Raja

2592  
Bt. Kapal

2592  
Bt. Kapal

TRENGGANU  
Kg. Kasong

G. Ayam  
2945

G. Korbu  
7162  
Kg. Rambutan

Cameron Highlands  
Kg. Ringlet  
Kg. Siput

Chenderiang  
Kg. Tapah  
Kg. Bidor

Chenderiang  
Kg. Tapah  
Kg. Bidor

P. Redang

Seti Lama  
Kg. Gobek

2592  
Bt. Kapal

2592  
Bt. Kapal

TRENGGANU  
Kg. Kasong

G. Ayam  
2945

G. Korbu  
7162  
Kg. Rambutan

Cameron Highlands  
Kg. Ringlet  
Kg. Siput

Chenderiang  
Kg. Tapah  
Kg. Bidor

Chenderiang  
Kg. Tapah  
Kg. Bidor

Marang

Merchang  
Kg. Mesta

2592  
Bt. Kapal

2592  
Bt. Kapal

TRENGGANU  
Kg. Kasong

G. Ayam  
2945

G. Korbu  
7162  
Kg. Rambutan

Cameron Highlands  
Kg. Ringlet  
Kg. Siput

Chenderiang  
Kg. Tapah  
Kg. Bidor

Chenderiang  
Kg. Tapah  
Kg. Bidor

P. Nyireh

P. Tenggol

2592  
Bt. Kapal

2592  
Bt. Kapal

TRENGGANU  
Kg. Kasong

G. Ayam  
2945

G. Korbu  
7162  
Kg. Rambutan

Cameron Highlands  
Kg. Ringlet  
Kg. Siput

Chenderiang  
Kg. Tapah  
Kg. Bidor

Chenderiang  
Kg. Tapah  
Kg. Bidor

18

19

17

18

19

18

19

18

19

17

S O U T H

C H I N A

S E A

I

20

19

25

24

23

P. Sekatung  
P. Natuna Utara

P. Semlun

P. Tokong Burong

P. Karang Buntâ

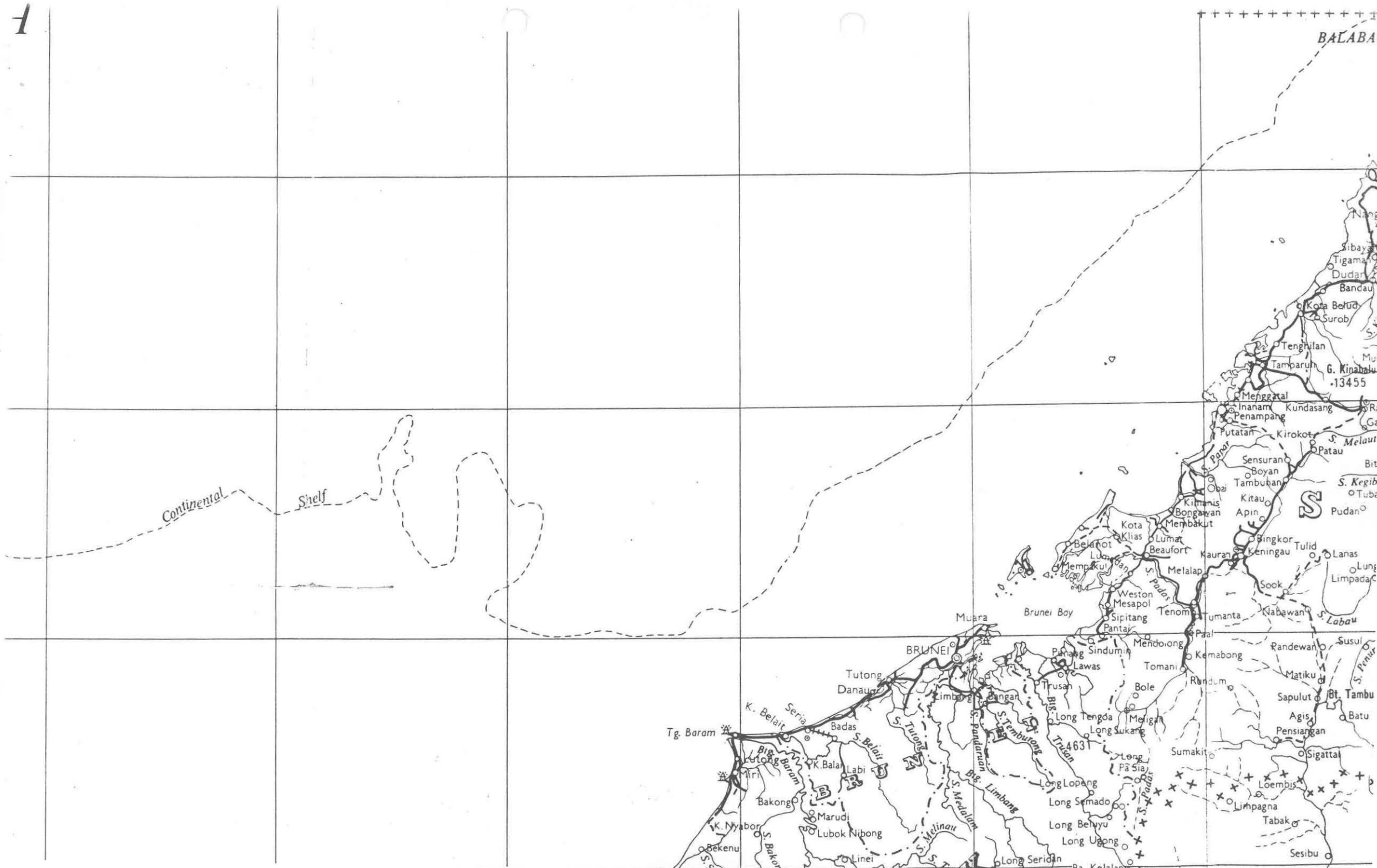
P. Seluery

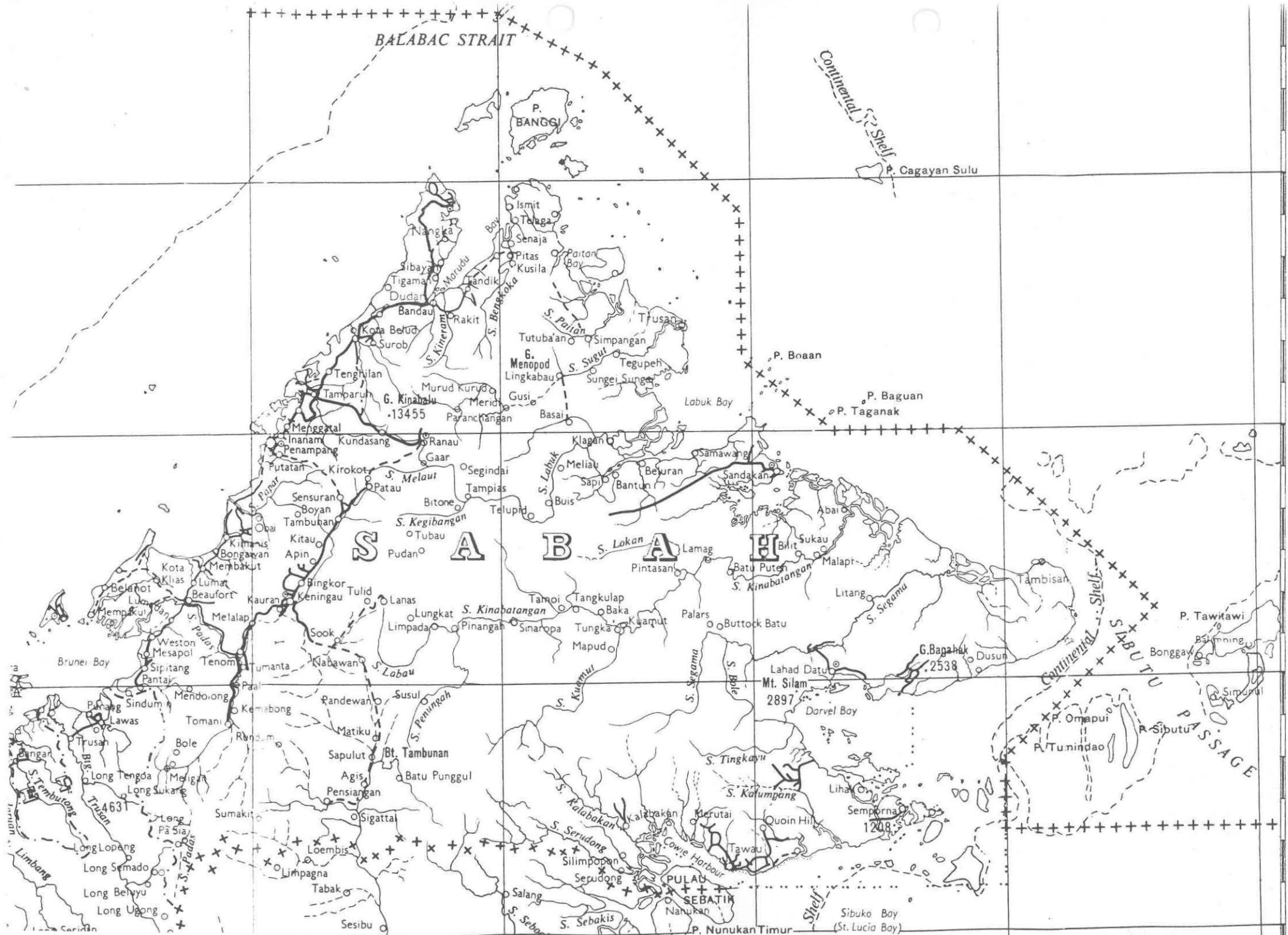
P. Selimu

P. Pandjang

P. Senua

P. Tokong Boro





7°

6°

5°

4°



3°

2°

1°

4

ITS

PULAU  
SIMEULUE  
Sinabang  
P. Tapah

P. Bibi

P. Ujungbatu  
P. Matahari  
P. Orongan  
TUANGKU  
P. Bangkaru

Tapaktuan

Bakungan

P. Musala

Barus

Pangururan

7077

Sibolga

Tabujung

Natal

P. F. N.

Belawan

Bindjai

Medan

Kabandjaho

Tebingtinggi

Pematangsiantar

Kisaran

Simpangkawat

Danau Toba

Siborongborong

Tarutung

Rantauparapat

Kotapinang Baru

Gunongtua

Padangsidempuan

Panjabungan  
7038

Raoe

P. Berhala

Tg. Bangsi

P. Si

P. T

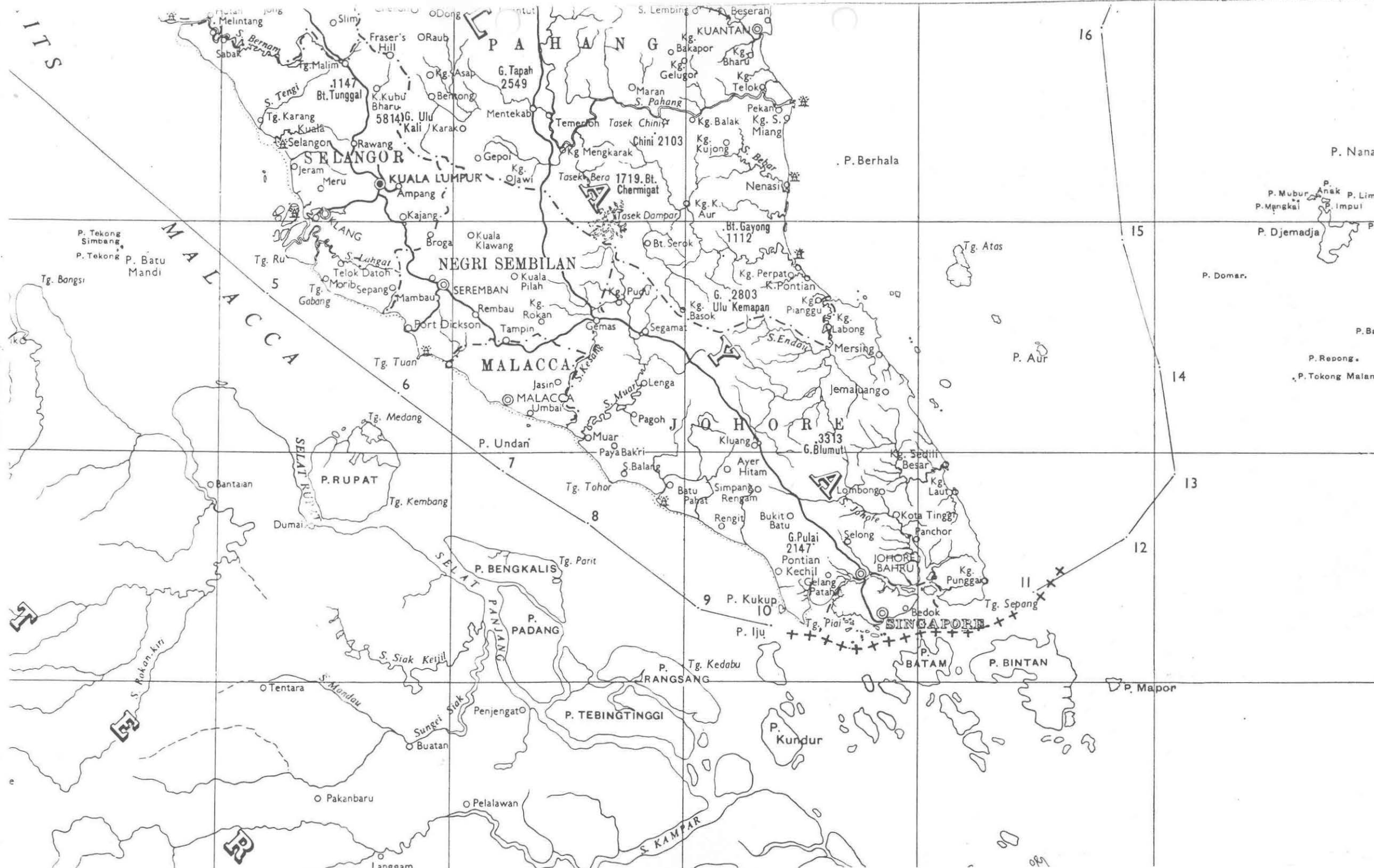
Sibgei Barumun

S. Asahan

S. Lalo Alas

9533





ITS

16

15

14

13

12

P. Tekong Simbang  
P. Tekong  
P. Batu Mandi

MALACCA

P. RUPAT

MALACCA

P. BENGKALIS

P. PADANG

P. TEBINGTINGGI

P. Kukup

P. Iju

P. LANGSANG

P. Kundur

P. BATAM

P. BINTAN

P. Mapor

P. Nana  
P. Mubur  
P. Anak  
P. Lim  
P. Impul

P. Djemadja

P. Domar.

P. Ba

P. Repong.

P. Tokong Malan

PAHANG

SELANGOR

NEGRI SEMBILAN

JOHORE

JOHORE BAHRU

SINGAPORE

1147 Bt. Tunggai

5814 G. Ulu Kali

2549 G. Tapah

2103 Chini

1719 Bt. Chermigat

1112 Bt. Gayong

2803 G. Ulu Kemapan

3313 G. Blumut

2147 G. Pulai

5 Tg. Ru

6 Tg. Tuan

7 P. Undan

8 Tg. Tohor

9 P. Kukup

10 P. Iju

11 Tg. Sepang

5 Tg. Marib Sepang

Tg. Medang

Tg. Kembang

Tg. Parit

Tg. Kedabu

Tg. Sepang

1147 Bt. Tunggai

5814 G. Ulu Kali

2549 G. Tapah

2103 Chini

1719 Bt. Chermigat

1112 Bt. Gayong

2803 G. Ulu Kemapan

3313 G. Blumut

2147 G. Pulai

5 Tg. Ru

6 Tg. Tuan

7 P. Undan

8 Tg. Tohor

9 P. Kukup

10 P. Iju

11 Tg. Sepang

5 Tg. Marib Sepang

Tg. Medang

Tg. Kembang

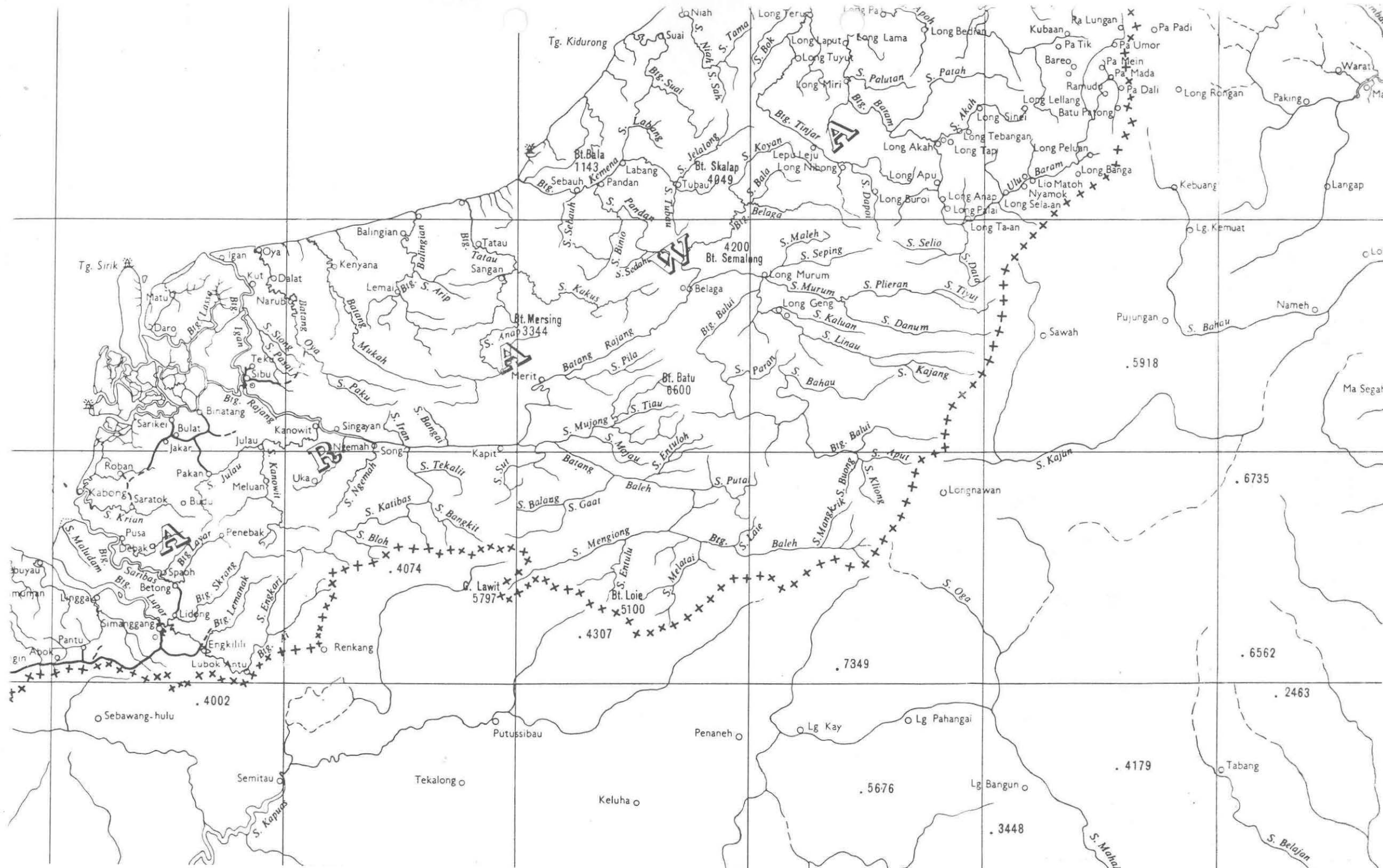
Tg. Parit

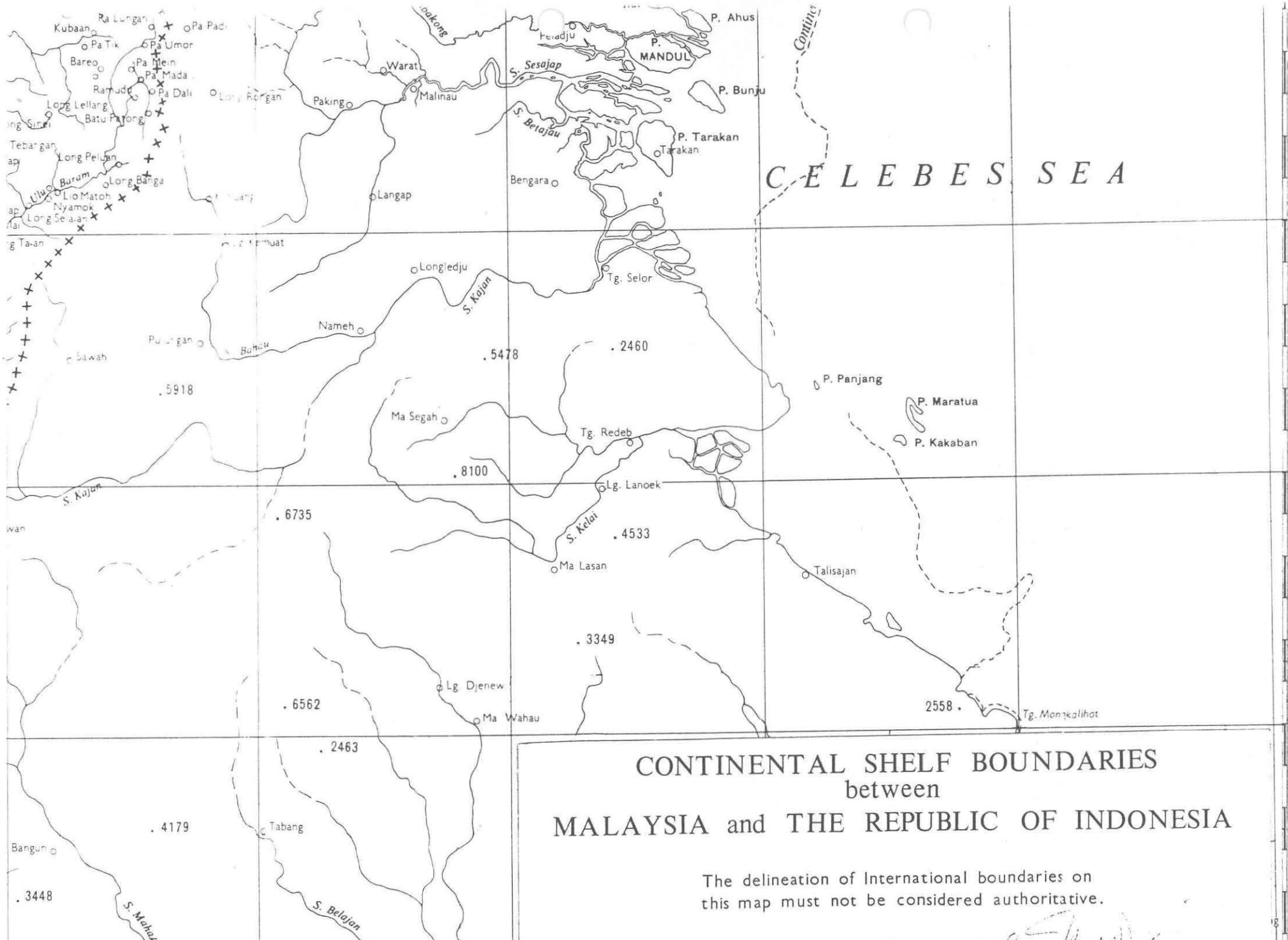
Tg. Kedabu

Tg. Sepang





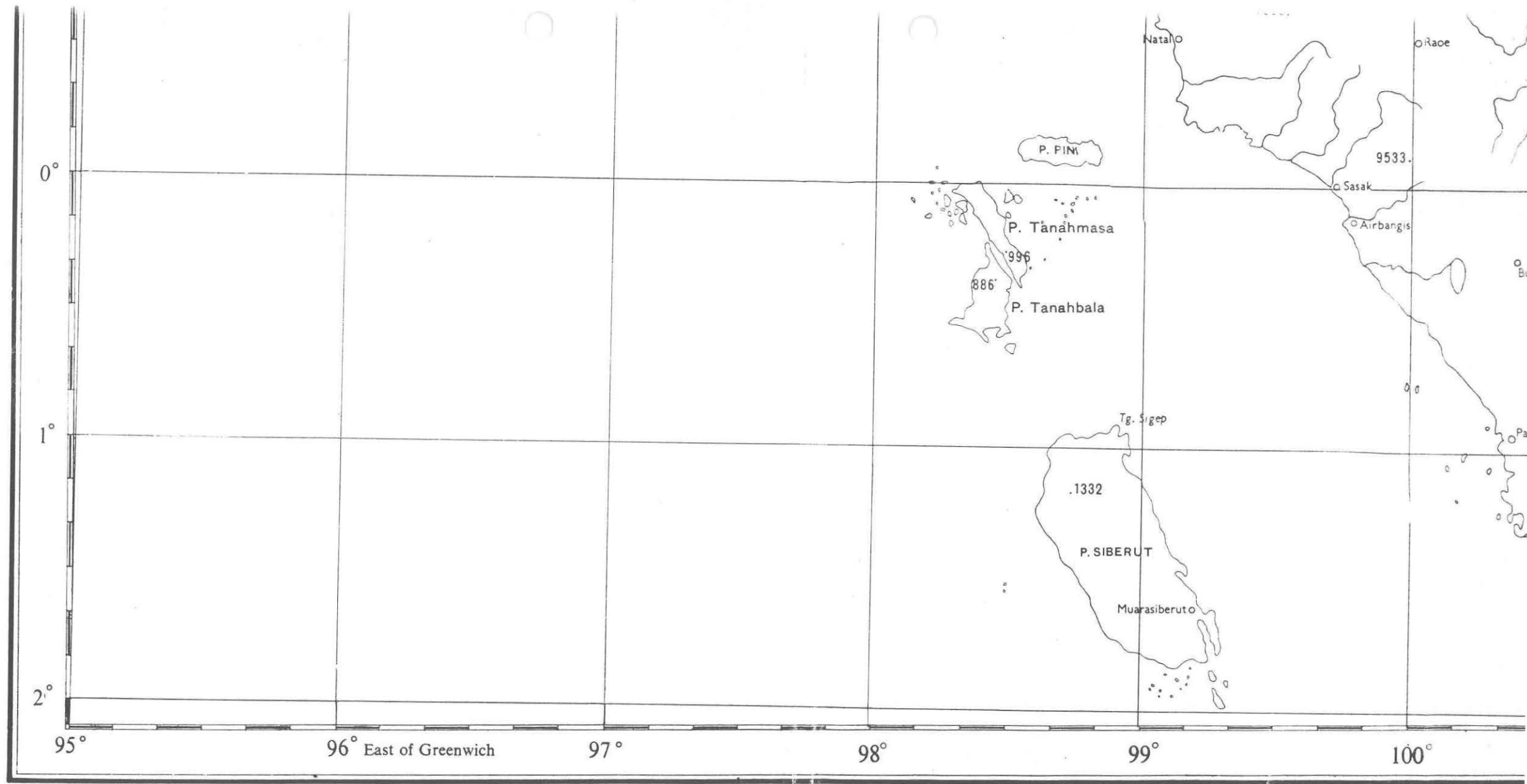


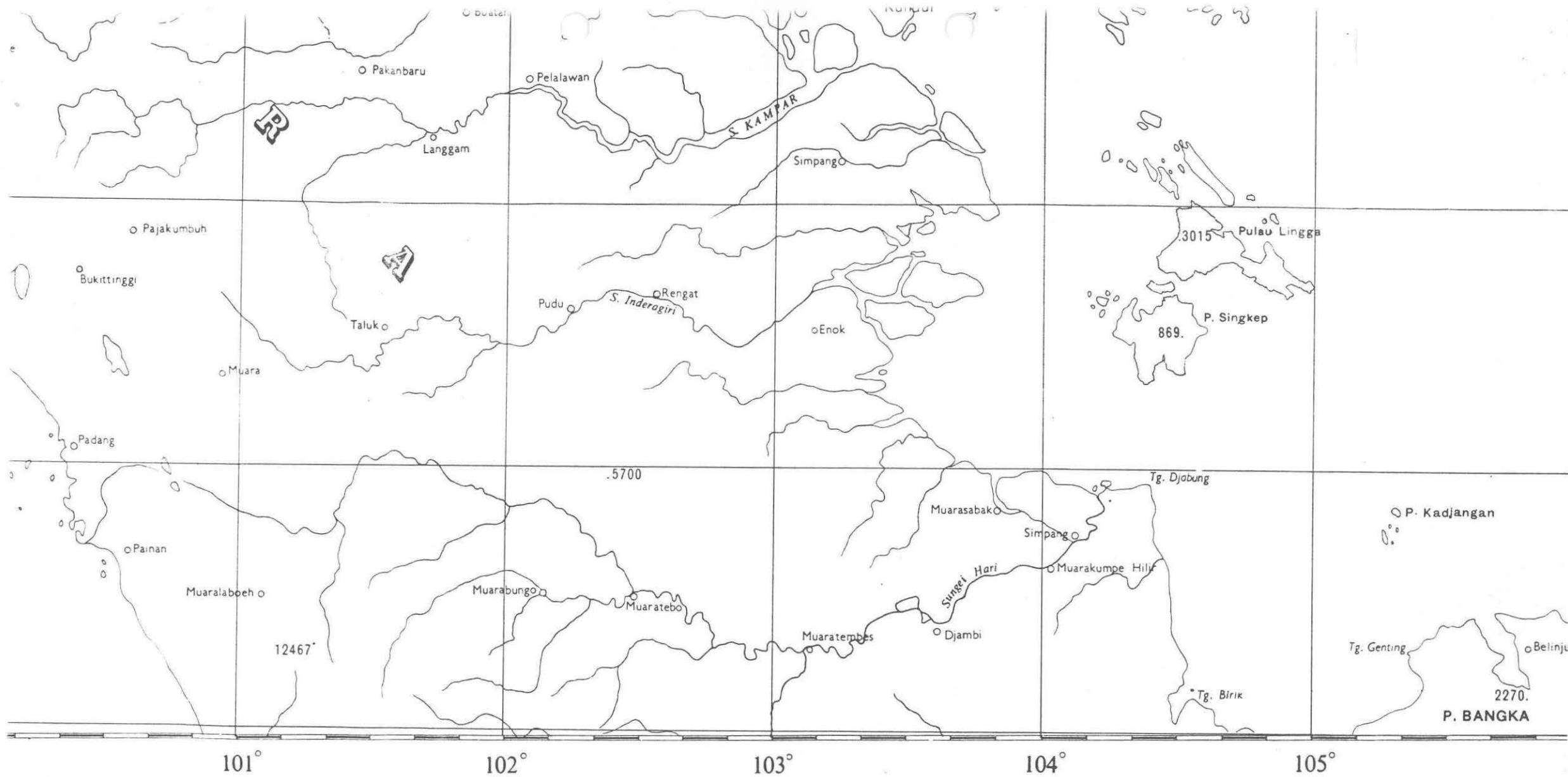


**CONTINENTAL SHELF BOUNDARIES**  
 between  
**MALAYSIA and THE REPUBLIC OF INDONESIA**

The delineation of International boundaries on  
 this map must not be considered authoritative.

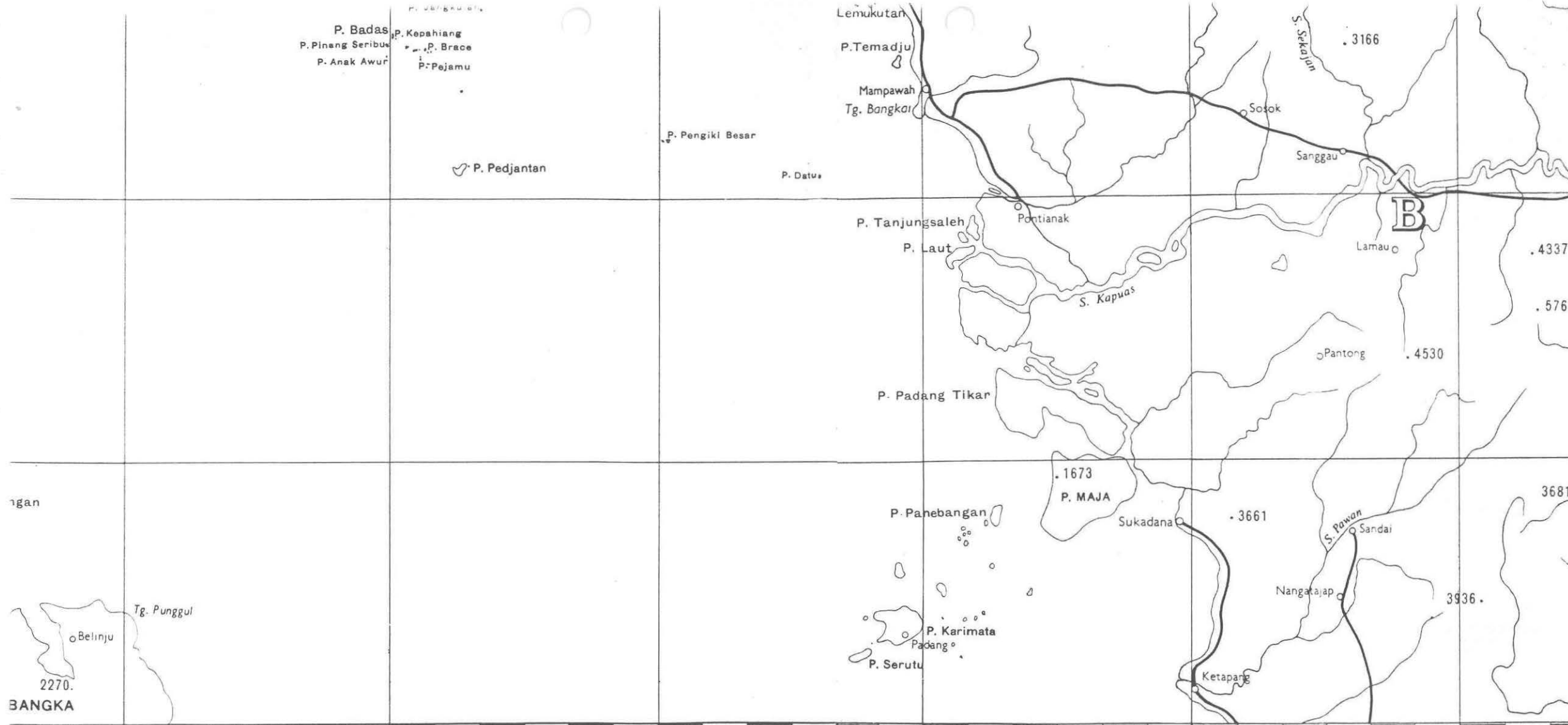
*[Handwritten signature]*

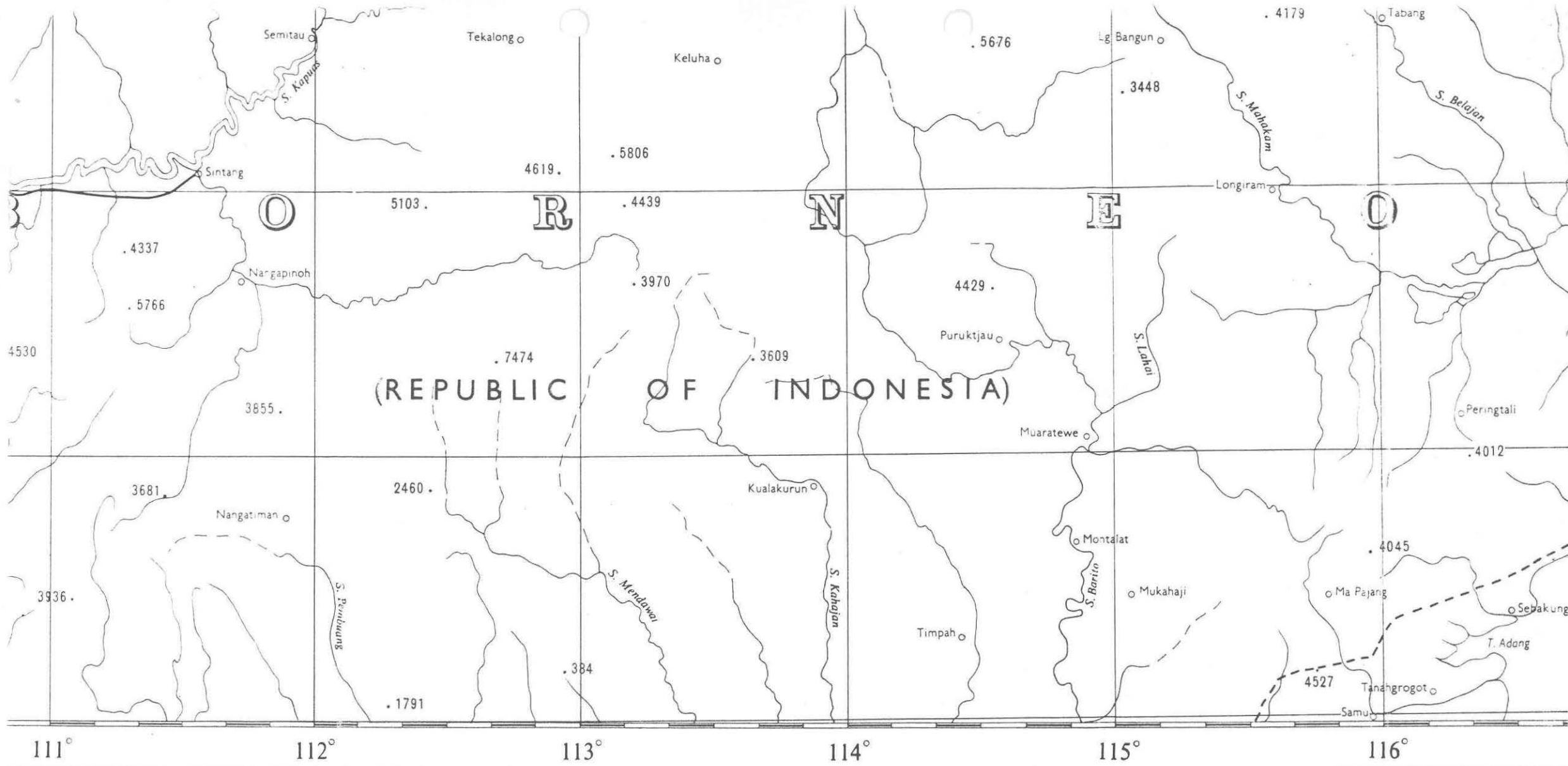




SCALE 1: 2,000,000  
 STATUTE MILES





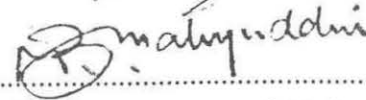


SCALE 1: 2,000,000  
STATUTE MILES

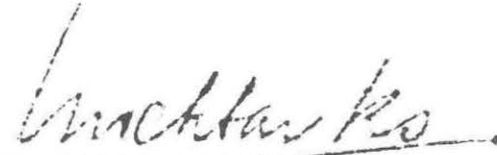


# MALAYSIA and THE REPUBLIC OF INDONESIA

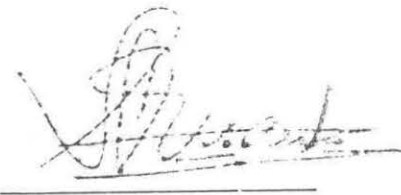
The delineation of International boundaries on this map must not be considered authoritative.



For the Government of Malaysia.



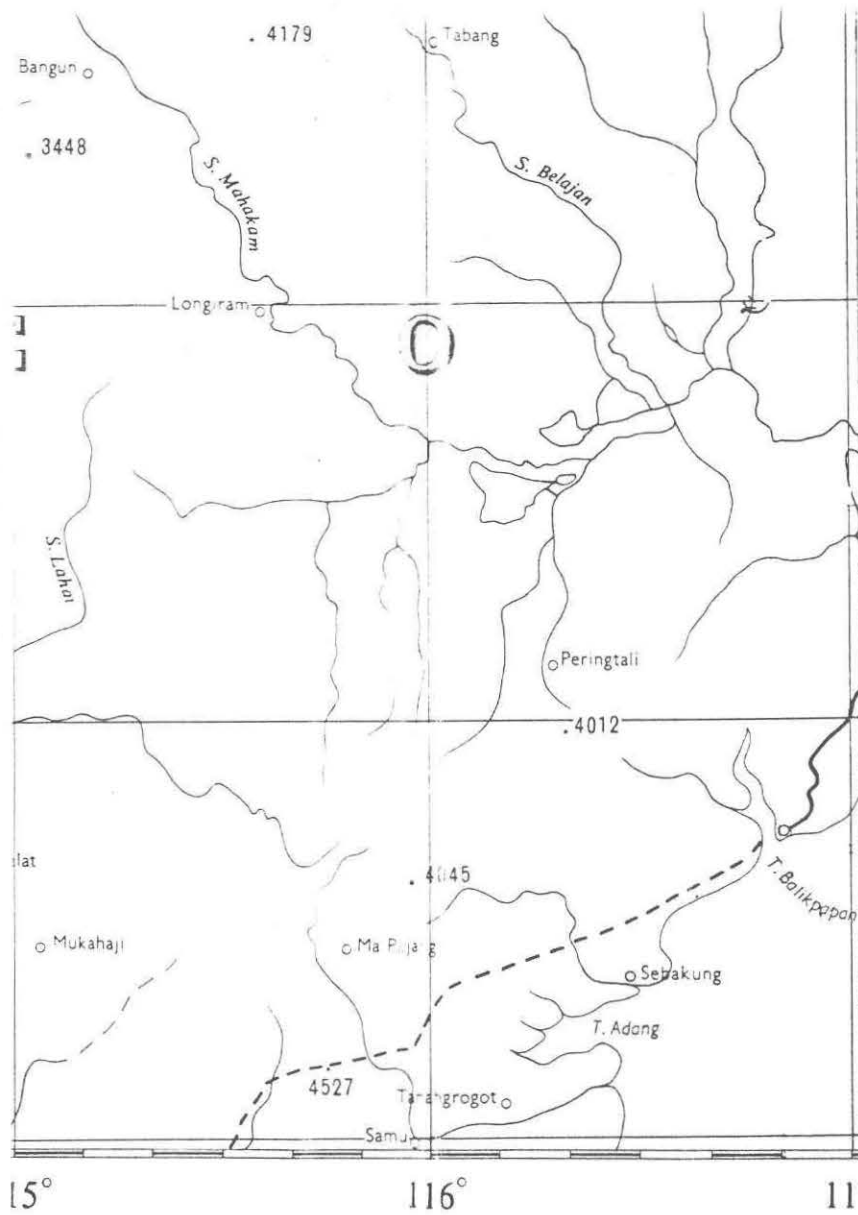
For the Government of the Republic of Indonesia.



*Continental Shelf Boundaries*

Hak Cipta Kerajaan Terpelihara

Kebenaran Pengarah Pemetaan Negara, Malaysia, wajib didapati sebelum peta ini atau sebahagian daripadanya di-salin.



Jabatanarah Pemetaan Negara, Malaysia. No. 30-1969

